

GEJALA DEINDUSTRIALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Rasbin¹⁾

Abstract

The phenomenon of deindustrialization in Indonesia can be seen today through several indicators such as the weakening absorption of employment in industrial sector in comparison to primary and service sectors, the decreasing contribution of manufacture sector to national economic growth, the lessening numbers of companies in industrial sectors, and further decreasing of competitive advantage of export commodities in international market, as at the same time the country is more secluded from regional and global networks of manufacture products. Some factors caused the deindustrialization phenomenon are bad infrastructure condition, the lack of energy supply, huge supply of import materials, the lack of loan and many disincentives in industrial sectors, and worsening performance of exports commodities.

Keywords: deindustrialization, national economy

Abstrak

Gejala deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri mengalami penurunan dibandingkan serapan tenaga kerja sektor lain seperti sektor primer dan jasa, menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri, kecenderungan penurunan daya saing produksi barang dalam negeri di pasar internasional dan Indonesia kian tersingkir dari jaringan produksi manufaktur regional dan global. Faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁾ Penulis adalah Kandidat Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail : ras9bin@yahoo.co.id.

deindustrialisasi meliputi buruknya kualitas infrastruktur, kurangnya jaminan pasokan energi, tingginya pasokan bahan baku impor, turunnya kredit industri, kebijakan-kebijakan kurang mendukung sektor industri, dan buruknya kinerja ekspor manufaktur.

Kata Kunci: deindustrialisasi, ekonomi nasional

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai rekor tertinggi yakni 3.757 poin. Hal ini menandakan semakin banyaknya investor menanamkan modalnya di Indonesia baik investor asing maupun domestik. Besarnya investasi yang ditanamkan di Indonesia merupakan modal untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui sektor industri maupun sektor-sektor lainnya. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya sekitar 5,8% pada triwulan III-2010. Pertanyaannya, ke manakah investasi yang masuk ke Indonesia tersebut? Diduga, investasi yang masuk ke Indonesia tersebut hanya ke sektor primer saja, yakni sektor pertambangan, yang sebagian besar hasilnya diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa ada nilai tambah di dalam negeri. Ini bertolak belakang dengan dana yang diinvestasikan ke sektor manufaktur yang kurang dari 14%. Dana asing yang masuk ke portofolio juga lebih besar diarahkan pada sektor pertambangan.¹

Kondisi ini diperparah dengan kredit perbankan ke sektor manufaktur, yakni sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, yang hanya sekitar 16% saja, turun tajam dibandingkan pada era Orde Baru yang mencapai 40%. Perbankan sejak krisis keuangan 1997/1998 memang mendapat sorotan. Sikap kehati-hatian membuat bank selektif memilih sektor yang menjadi target kredit. Sebaliknya, kredit perbankan ke sektor konsumsi kian deras. Akibatnya sektor manufaktur harus berpikir keras untuk memperoleh dana murah dari masyarakat, misalnya melalui *initial public offering* (IPO) atau surat utang (*bond*),² sehingga dapat dikatakan awal terjadinya deindustrialisasi mulai tampak di Indonesia.

Selama ini perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh industri manufaktur, yang merupakan *prime mover* Produk Domestik Bruto (PDB)

¹"Madu atau Racun Cadangan Devisa", *Kompas*, 24 Desember 2010.

dan ekspor nonmigas Indonesia, tetapi kini bergeser ke sektor jasa, terutama jasa modern yang kurang menyerap tenaga kerja. Akibatnya, jumlah pengangguran di negeri ini semakin besar. Pada tahun 2007 industri manufaktur tumbuh hingga mencapai 4,7% kemudian melambat menjadi 2,1% pada tahun 2009. Sementara itu, industri manufaktur nonmigas pada tahun 2007 tumbuh sekitar 5,1% kemudian sekarang melambat menjadi 2,5%.³

Sampai awal 2008, Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) bahkan mencatat, industri hanya tumbuh sekitar 5,69%, melambat hampir 2% sejak 2004. Pertumbuhan industri terendah terjadi pada industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki yang pertumbuhannya semakin memprihatinkan dari minus 3,68% menjadi minus 7,10%. Dua sektor lainnya yakni industri barang lainnya dari minus 2,82% pada akhir 2007 menjadi minus 6,88%, serta industri barang kayu dan hasil hutan yakni minus 0,06%, meski masih lebih baik dibanding tahun sebelumnya minus 1,74%.⁴

Pertumbuhan industri manufaktur sejak krisis 1998 turun begitu drastis. Industri manufaktur nonmigas selama 1987-1996 mengalami pertumbuhan rata-rata 12% per tahunnya, lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Antara tahun 2000-2008, industri manufaktur hanya tumbuh rata-rata 5,7% per tahun, sedikit lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan PDB (5,2%).⁵ Pertumbuhan sektor manufaktur semakin terpuruk ketika krisis ekonomi global 2008 melanda dunia. Industri manufaktur yang tumbuh hingga 4,7% tahun 2007 melambat menjadi 2,1% tahun 2009. Industri manufaktur nonmigas yang tumbuh 5,1% tahun 2007 melambat menjadi 2,5%.⁶ Pertumbuhan sektor manufaktur kuartal I 2011 ditaksir kurang dari 5% atau di bawah target tahunan pemerintah tahun 2011 yang mencapai 6,1%.⁷

Fakta yang ada tersebut semakin menguatkan anggapan perekonomian Indonesia bergerak menuju era *deindustrialisasi dimana* ancaman deindustrialisasi tersebut semakin lancar bergerak dengan ditandai oleh semakin banyaknya perusahaan yang dianggap bagian dari kelompok *sunset industry* terpaksa gulung tikar akibat kombinasi faktor eksternal dan internal.

²*Ibid.*

³"Deindustrialisasi Bukan Hal Mustahil", *Kompas*, 6 Desember 2010.

⁴"Deindustrialisasi di Depan Mata", <http://www.inilah.com/read/detail/46876/deindustrialisasi-di-depan-mata/>; diakses 20 Januari 2011.

⁵Mudrajad Kuncoro, 2009, *Stop Deindustrialisasi*, www.mudrajad.com; diakses 3 Maret 2011.

⁶"Deindustrialisasi Bukan Hal Mustahil", *op.cit.*

⁷Rudi Ariffianto, "Pertumbuhan Manufaktur di Bawah Target", *Bisnis Indonesia*, 14 April 2011.

Seperti kenaikan harga BBM yang dilakukan beberapa kali pada Mei 2008, pasokan listrik, dan beberapa gejolak eksternal lainnya.

B. Permasalahan

Gejala deindustrialisasi yang mulai terjadi di Indonesia sudah dirasakan dampaknya baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun sektor tenaga kerja. Tidak sedikit pelaku usaha yang gulung tikar atau pindah profesi dari yang tadinya sebagai produsen menjadi pedagang. Sektor tenaga kerja juga tidak luput dari fenomena deindustrialisasi ini. Dampak akhir dari kondisi ini jika terus berlanjut adalah turunnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. Dengan gambaran seperti itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah deindustrialisasi telah terjadi di Indonesia dan apa pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, tulisan ini akan dibagi dalam 3 bahasan yaitu:

1. Indikator-indikator apa yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa fenomena deindustrialisasi telah terjadi di Indonesia.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya deindustrialisasi di Indonesia, dan
3. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh deindustrialisasi terhadap perekonomian Indonesia.

C. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi gejala-gejala terjadinya deindustrialisasi di Indonesia yang bisa diketahui dari suatu indikator tertentu dan juga dampaknya terhadap perekonomian nasional. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang industri.

II. Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa deindustrialisasi merupakan sebuah proses dinamis yang terkait dengan tren menurunnya kinerja manufaktur dan tingkat penyerapan tenaga kerja di industri dalam kurun waktu tertentu. Ada juga yang menyatakan bahwa deindustrialisasi merupakan suatu fenomena

dimana *share* tenaga kerja di sektor manufaktur mengalami penurunan secara kontinu untuk waktu lebih dari dua dekade dalam ekonomi maju.⁸ Konsep terbaik tentang deindustrialisasi adalah apa yang disebut sebagai “*Cambridge View*” yang identik dengan pendapat Singh (1977) yang menyatakan bahwa deindustrialisasi merupakan keadaan patologis ketika suatu ekonomi berhenti dari yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan potensial penuh, tenaga kerja, dan pemanfaatan sumber daya.⁹

Deindustrialisasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu deindustrialisasi positif, deindustrialisasi negatif, dan deindustrialisasi yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur perdagangan luar negeri.¹⁰ Deindustrialisasi positif hanya terjadi di negara-negara yang sangat maju, dan tidak dapat diobservasi di negara-negara kurang maju, di mana dinamisnya industri secara normal disertai dengan peningkatan *share* manufaktur dalam total tenaga kerja. Deindustrialisasi negatif terjadi ketika industri dalam kesulitan yang parah dan kinerja perekonomian secara umum adalah miskin. Di bawah keadaan ini, tenaga kerja pindah dari sektor manufaktur, karena jatuhnya output atau produktivitas yang tinggi, tidak akan diserap ke dalam sektor jasa. Pengangguran akan meningkat. Jadi, deindustrialisasi negatif berkaitan dengan pendapatan riil yang stagnan dan pengangguran yang meningkat.

Deindustrialisasi yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur perdagangan luar negeri, terjadi ketika pola ekspor bersih bergerak menjauh dari sektor manufaktur terhadap barang dan jasa lainnya. Hal ini akan menyebabkan perpindahan tenaga kerja sumber daya dari sektor manufaktur ke sektor lainnya sehingga terjadi penurunan *share* manufaktur dalam total tenaga kerja.

Sebagian besar tenaga kerja di negara maju bekerja baik di sektor manufaktur maupun jasa, dimana evolusi *share* tenaganya tergantung pada tren output dan produktivitas pada kedua sektor ini. Dalam ekonomi maju, produktivitas tenaga kerja biasanya tumbuh lebih cepat di bidang manufaktur daripada sektor jasa, sedangkan pertumbuhan output sudah hampir sama di setiap sektor. Dengan demikian, mengingat kemiripan tren output dalam dua

⁸Robert Rowthorn dan Ramana Ramaswamy, *Growth, Trade, and Deindustrialization*, IMF Staff Papers, Vol. 46, No. 1, Maret 1999, hal. 18.

⁹Sukti Dasgupta dan Ajit Singh, *Manufacturing, Services and Premature De-Industrialisation in Developing Countries : A Kaldorian Empirical Analysis*, Centre for Business Research (CBR), University of Cambridge, WP. No. 327, Juni 2006.

¹⁰R.E.Rowthorn dan J.R.Wells, *De-Industrialization and Foreign Trade*, New York : Cambridge University Press, 1987.

sektor ini, tertinggalnya produktivitas di sektor jasa mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan produktivitas yang cepat di bidang manufaktur menyebabkan *share* tenaganya berkurang.

Studi kasus tentang deindustrialisasi di negara-negara berkembang dilakukan oleh Choi (2005). Studi yang dilakukan oleh Choi meneliti tentang efek deindustrialisasi dan kesejahteraan dari bantuan infrastruktur di negara-negara berkembang. Dalam jangka pendek, *cost-saving* bantuan infrastruktur di sektor ekspor meningkatkan tingkat upah domestik, sedangkan bantuan yang sama di sektor impor akan menurunkan tingkat upah domestik. Biaya barang *nontraded* meningkat apakah sektor ekspor atau impor menerima bantuan infrastruktur. Bantuan infrastruktur di sektor *nontraded* tidak mempengaruhi harga-harga faktor-faktor domestik. Bantuan infrastruktur *labor-saving* menyebabkan ekspansi sektor ekspor, sementara bantuan infrastruktur *capital-saving* menghasilkan efek *Dutch disease* di sektor ekspor. Jika bantuan di bawah tingkat optimal, bantuan infrastruktur meningkatkan pendapatan konsumen dan kesejahteraan.¹¹

Studi yang dilakukan di Indonesia tentang deindustrialisasi oleh Suwarman (2006)¹². Studi yang dilakukan oleh Suwarman bertujuan untuk menginvestigasi variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Melalui analisis perilaku variabel-variabel yang signifikan tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor apakah yang secara signifikan mendorong terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum mencapai tahap perekonomian sangat maju, yang dicirikan dengan belum tercapainya suatu tingkat pendapatan per kapita titik balik (*turning point*) yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita selanjutnya justru akan menurunkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Proses deindustrialisasi di Indonesia beberapa tahun terakhir bukanlah dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan lebih disebabkan oleh berbagai guncangan (*shock*) terhadap sistem perekonomian.

¹¹E.K.Choi, *Infrastruktur Aid, Deindustrialization and Welfare*, IMF Working Papers, WP/05/150, Juli 2005.

¹²Wawan Suwarman, *Faktor-faktor Apakah yang Mendorong Terjadinya Proses Deindustrialisasi di Indonesia?*, Tesis, Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

III. Pembahasan

A. Gejala Deindustrialisasi

Terjadinya gejala deindustrialisasi di Indonesia ditandai dengan melemahnya daya saing sektor industri Indonesia.¹³ Secara mikro, gejalanya diawali dengan adanya kenaikan biaya produksi yang lebih besar dibanding dengan kenaikan harga jual produk di pasar. Kenaikan biaya produksi tersebut disebabkan oleh naiknya harga bahan-bahan baku, energi, dan sebagainya. Kenaikan biaya produksi yang tidak dapat ditransmisikan pada kenaikan harga pasar itu pada gilirannya menyebabkan kerugian di sektor industri. Jika kerugian sektor industri terjadi secara terus menerus dan tidak bisa dicegah, kebangkrutan sektor industri tak dapat dielakkan lagi.¹⁴ Hal itu tampak dalam keruntuhan sektor produksi manufaktur yang berbasis padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik, dan mebel.¹⁵

Sejak Januari 2006 indeks harga riil produk industri¹⁶ secara umum memperlihatkan tren menurun. Dengan kata lain, sejak periode tersebut tren peningkatan harga-harga produk industri relatif lebih rendah dibandingkan tren peningkatan harga-harga produk non-industri (lihat Gambar 1). Bila mengacu pada teori elastisitas harga (*price elasticity of substitution*) antara produk industri dan non-industri, semestinya sejak Januari 2006 tersebut permintaan terhadap produk industri akan meningkat.¹⁷ Dengan kata lain, sejak periode tersebut seharusnya kontribusi sektor industri dalam PDB kembali meningkat.

Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDB seharusnya meningkat ketika tren peningkatan harga-harga produk industri relatif lebih rendah dibandingkan tren peningkatan harga-harga produk non-industri dan juga peningkatan daya beli masyarakat dimana indikator daya beli masyarakat yang digunakan adalah PDB per kapita. Berdasarkan laporan BPS, pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia mengalami peningkatan (lihat Gambar 2), artinya periode 2000–2009 terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. Namun peningkatan PDB per kapita tersebut ternyata tidak serta merta diikuti oleh

¹³Denasionalisasi Ekonomi, dalam A. Prasetyantoko, *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2009.

¹⁴Fahmy Radhi, *op.cit.*

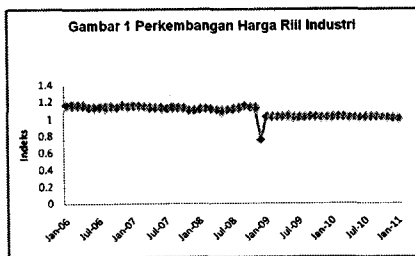
¹⁵Denasionalisasi Ekonomi, *op.cit.*

¹⁶Rasio indeks harga produk industri terhadap indeks harga umum sebagai proksi terhadap elastisitas substitusi harga antara produk industri terhadap produk non-industri.

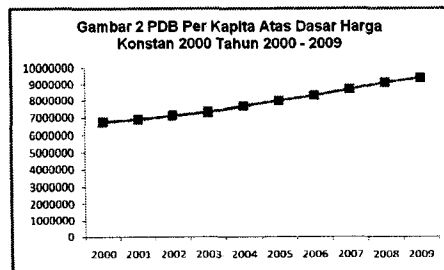
¹⁷Robert Rowthorn and Ramana Ramaswamy, *Growth, Trade and Deindustrialization*, *op.cit.*

tren peningkatan kontribusi sektor industri khususnya manufaktur dalam PDB. Padahal, seharusnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, peran (share) industri khususnya sektor industri manufaktur dalam PDB akan terus meningkat.¹⁸ Dilihat dari gejala-gejala yang terjadi di Indonesia, saat ini perekonomian nasional mulai bergerak ke arah deindustrialisasi.

Indikator pertama, gejala yang bisa diindikasikan terjadinya deindustrialisasi adalah tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri khususnya sektor manufaktur makin menurun dibandingkan serapan tenaga kerja sektor lain seperti pertanian, pertambangan dan jasa. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), porsi tenaga kerja yang bekerja di bidang industri manufaktur hanya sekitar 12,78% dari total tenaga kerja aktif. Porsi ini masih lebih rendah dibandingkan porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 38,35%, sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel sebesar 20,79%, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 14,75%.¹⁹ Gejala deindustrialisasi seperti ini merupakan sebuah konsekuensi dari proses pembangunan dimana peran dominan sektor manufaktur pada suatu wilayah digantikan oleh sektor jasa. Fenomena deindustrialisasi seperti ini biasa disebut dengan deindustrialisasi positif.²⁰



Sumber : BPS (diolah), 2006-2011



Sumber : BPS (diolah), 2000-2009

¹⁸Hollis Chenery dan Moises Syrquin, *Patterns of Development, 1950 – 1970*, Oxford University Press, 1975.

¹⁹Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2010, Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah.

²⁰R.E.Rowthorn dan J.R.Wells, *op.cit*

Indikator kedua sebagai indikasi deindustrialisasi terlihat dari menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor jasa memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor manufaktur ataupun PDB.²¹ Tidak hanya di negara-negara maju, di negara berkembang seperti Indonesia, dikenal masyarakat yang disebut *post-industrial* sehingga membuat paradigma perekonomian modern cenderung beralih dari sektor industri ke sektor jasa. Konsekuensinya menyebabkan kontribusi umum sektor jasa dalam PDB meningkat secara drastis.²²

Indikator ketiga terlihat dari penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri, terutama industri manufaktur. Penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri akan berakibat pada penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada akhir 2010, data industri besar dan menengah menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan yang keluar (*exit*) daripada yang masuk (*entry*), sehingga menghasilkan *net entry* yang negatif. Juga terjadi penurunan kapasitas produksi dari perusahaan-perusahaan yang masih tetap bertahan.²³

Indikator keempat, kecenderungan penurunan daya saing produksi barang dalam negeri di pasar internasional. Berdasarkan *World Competitiveness Yearbook (WCY)* yang diterbitkan oleh *International Institute for Management Development*, setelah krisis tahun 1998 daya saing Indonesia hampir selalu berada pada urutan kedua terendah. Peningkatan pesat dari urutan ke-54 tahun 2007 menjadi urutan ke-42 tahun 2009 lebih disebabkan oleh krisis global yang banyak membenamkan negara-negara pesaing kita. Namun, mereka segera pulih sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari perkiraan semula, mengingat fondasi mereka lebih baik dari Indonesia, sehingga posisi Indonesia kembali terancam.²⁴ Pada tahun 2010 peringkat daya saing Indonesia sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yakni berada pada urutan ke-35 dengan skor 60,745 dari skor 100. Peringkat Indonesia tersebut dalam ASEAN 5 (yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina) sedikit lebih baik dibandingkan Filipina (39).²⁵

²¹Sukti Dasgupta dan Ajit Singh, *op.cit.*

²²Hery S.J.N. Sriwiyanto, *Fenomena Deindustrialisasi dan Formulasi Industri Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, 8 – 9 Desember 2004, di Hotel Nikko Jakarta.

²³Faisal Basri, 2009, *Deindustrialisasi Betul-Betul Serius!*, www.kompasiana.com; diakses 2 Maret 2011.

²⁴Faisal Basri, 2009, *op.cit.*

²⁵World Competitiveness Yearbook Tahun 2010, www.imd.org; diakses 4 Maret 2011.

Indikator kelima, Indonesia kian tersingkir dari jaringan produksi manufaktur regional dan global. Hal ini terlihat dari porsi *parts and components* yang sangat kecil di dalam ekspor Indonesia, yakni hanya belasan persen saja. Bandingkan dengan Malaysia dan Filipina yang masing-masing di atas 40% dan 60%. Struktur industri yang lemah membuat daya tarik kita bagi FDI (*foreign direct investment*) relatif sangat rendah. Padahal, peranan FDI terbukti sangat vital dalam percepatan industrialisasi. Adalah peranan FDI ini pula yang membuat perekonomian Cina sangat dinamis. Terbukti dari lebih separuh ekspor Cina berasal dari perusahaan-perusahaan asing.²⁶

B. Faktor-faktor Penyebab Deindustrialisasi

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, indikasi deindustrialisasi di Indonesia terlihat dengan terjadinya gejala-gejala yang mengarah ke kondisi tersebut,²⁷ dimana proses deindustrialisasi di Indonesia beberapa tahun terakhir bukanlah dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan lebih disebabkan oleh sejumlah guncangan (*shock*) terhadap sistem perekonomian.²⁸ Terjadinya deindustrialisasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan eksternal maupun kombinasi keduanya.²⁹

1. Buruknya Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*. Dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap biaya produksi. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara merupakan sarana untuk memperliancar proses transportasi bahan-bahan baku produksi dan memasarkan produk yang dihasilkan. Biaya transportasi tersebut merupakan salah satu biaya yang termasuk dalam biaya

²⁶Faisal Basri, 2009, *op.cit.*

²⁷Andina Meryani, 2010,

Buruknya Infrastruktur Picu Deindustrialisasi, <http://economy.okezone.com>; diakses 2 Maret 2011.

²⁸Wawan Suwarman, *op.cit.*

²⁹Sachs dan Schatz (1994), Wood (1994 dan 1995), dan Saeger (1996).

produksi. Semakin bagus kualitas infrastuktur maka biaya transportasinya menjadi murah begitu juga dengan biaya produksi, juga sebaliknya.

Infrastruktur di Indonesia tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas secara signifikan. Rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia merupakan kendala klasik dari dulu hingga sekarang. Indikator kualitas infrastruktur di Indonesia yang masih rendah dan bisa dibilang buruk dapat dilihat dari indeks *Global Competitiveness Index* (GCI). Berdasarkan indeks GCI ini, kualitas infrastruktur Indonesia masih rendah dengan nilai skor yang rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam ASEAN, infrastruktur Indonesia merupakan yang paling rendah peringkatnya dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Vietnam, Kamboja, dan Filipina yang merupakan negara-negara ASEAN yang memang masih di bawah Indonesia. Kondisi jalan di Indonesia masih sedikit lebih bagus dibandingkan India dan Filipina.

Infrastruktur dinilai menjadi *bottle neck* untuk mendorong dunia usaha. Buruknya kualitas infrastruktur menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi sehingga biaya produksi di Indonesia menjadi tinggi. Setidaknya ada pemborosan Rp 37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.³⁰ Biaya logistik di Indonesia mencapai 30% dari total nilai PDB nasional.³¹ Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik pada Kadin Indonesia, Natsir Mansyur, biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi, berkisar 15% sampai 30% dari biaya produksi. Sementara Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi, Sakri Widhianto, rasio biaya logistik terhadap nilai tambah produk Indonesia masih sekitar 61%. Rasio biaya logistik dan nilai tambah produk di Indonesia masih lebih besar dibandingkan negara-negara lain seperti Thailand sebesar 25% dan Korea Selatan sebesar 16%.³² Hal ini yang membuat nilai kompetitif Indonesia dalam perdagangan dunia sangat rendah sehingga produk-produk Indonesia sulit bersaing dengan produk-produk negara lain. Akibatnya produk-produk yang dihasilkan kurang kompetitif dan kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Oleh karena itu, salah satu faktor pemicu penyebab terjadinya deindustrialisasi di Indonesia adalah masih buruknya kualitas infrastruktur Indonesia.

³⁰Editorial : Tragedi Infrastruktur", *Media Indonesia*, 7 April 2011.

³¹"Ketimpangan Alur Distribusi Turunkan Nilai Kompetitif", *Kompas*, 15 Januari 2010.

³²"Daya Saing Produk Terbebani Biaya Logistik", *Neraca*, 11 Februari 2011.

2. Kurangnya Jaminan Pasokan Energi

Ketersediaan energi yang cukup menjadi syarat mutlak bagi perkembangan sebuah negara. Tanpa adanya pasokan energi yang memadai tentunya dapat membuat terhambatnya proses pembangunan suatu negara.

a. Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM

Bagi dunia usaha kenaikan harga BBM akan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya menaikkan harga jual produk. Kebijakan kenaikan harga BBM pada Maret 2005 menyebabkan kenaikan biaya produksi secara signifikan di sektor industri, terutama industri yang banyak menggunakan bahan baku BBM. Hal ini karena tingginya tingkat ketergantungan industri pada BBM. Kenaikan biaya produksi yang tidak diikuti oleh kenaikan harga pasar menyebabkan banyak industri yang menghentikan operasinya karena kondisi seperti ini menyebabkan kerugian. Melemahnya daya tahan perusahaan industri manufaktur menyebabkan perusahaan industri manufaktur terdorong untuk keluar dari pasar. Bila pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7,2% maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5,1%. Ini terjadi karena industri ditekan dari dua sisi yakni peningkatan biaya produksi, juga merosotnya *demand* akibat menurunnya daya beli masyarakat.³³ Jadi, dampak dari kenaikan harga BBM ini adalah mendorong percepatan terjadinya deindustrialisasi di Indonesia.

b. Kurangnya Pasokan Listrik dan Kebijakan Pemerintah Menaikkan Tarif Dasar Listrik

Masalah yang masih sering dihadapi kalangan industri dalam produksinya selain kenaikan harga BBM adalah kurangnya pasokan listrik dan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Perkembangan sektor listrik memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian karena keterkaitannya yang erat dengan aktivitas produksi sektor-sektor lain dalam perekonomian, terutama sektor pertambangan dan industri. Ketergantungan industri terhadap listrik dalam produksinya di Indonesia tergolong sangat tinggi. Akibatnya apabila pasokan listrik berkurang, tingkat produksi mengalami penurunan. Selain tingkat

³³Kenaikan Harga BBM : Kebijakan Panik dan Tidak Adil", <http://teguhtimur.com/2008/05/09/>; diakses 10 Maret 2011.

produksinya menjadi turun, tingkat efisiensinya menjadi turun. Listrik yang didistribusikan kepada sektor industri sejak tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan sektor rumah tangga, Pertumbuhan distribusi listrik ke sektor industri sejak tahun 2005 terus mengalami penurunan, bahkan tahun 2009 pertumbuhannya sebesar minus 3,68%.³⁴

Selain pasokan listrik yang kurang, kendala lainnya berkaitan dengan listrik adalah naiknya TDL untuk industri yakni rata-rata sekitar 10% mulai 1 Juli 2010.³⁵ Menaikkan TDL akan semakin memperburuk sektor industri di dalam negeri. Naiknya TDL akan memberikan dampak ekonomi bagi kalangan usaha dan industri. Bagi pelaku usaha, kenaikan TDL dirasa akan memberatkan karena menambah beban produksi. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, kenaikan TDL 10% akan menurunkan konsumsi listrik sektor industri sebesar 6,7% dan sekaligus penurunan permintaan tenaga kerja 1,17%. Penurunan permintaan konsumsi listrik merupakan upaya efisiensi yang dilakukan industri akibat kenaikan TDL.³⁶ Konsumsi listrik yang turun akan mengakibatkan tingkat produksi industri turun.

c. Ketersediaan Gas yang Minim untuk Industri

Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Industri, Franky Sibarani, menilai selama ini pemerintah tidak memiliki keseriusan menanggulangi kebutuhan gas domestik untuk sektor industri. Pemerintah dinilai lebih mengutamakan peningkatan ekspor gas ke luar negeri. Menurut Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), lebih dari 50% gas Indonesia mengalir ke pasar ekspor. Sedangkan total kebutuhan gas nasional dalam negeri tahun 2010 mencapai 2.900 standar metrik kaki kubik per hari (MMSCFD),³⁷ dan kebutuhan gas untuk industri hilir mencapai 1.500 MMSCFD, tetapi komitmen pasokan gas hanya sepertiga dari total kebutuhan itu. Padahal tiap tahun pertumbuhan pemakaian gas untuk industri mencapai 20%.³⁸ Menurut Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk. Hendi P Santoso, pasokan gas untuk konsumen PGN mencapai 900 juta MMSCFD.³⁹

³⁴Publikasi BPS (data diolah), www.bps.go.id; diakses 20 April 2011.

³⁵"Waspadai Lonjakan Pengangguran Akibat Kenaikan TDL", www.republika.co.id; diakses 7 April 2011.

³⁶"Waspadai Lonjakan Pengangguran Akibat Kenaikan TDL"*op.cit.*

³⁷*Ibid.*

³⁸"Industri Minta Kepastian Pasokan Gas", *op.cit.*

³⁹"PGN Akui Pasokan Gas Timpang", *op.cit.*

3. Tingginya Pasokan Bahan Baku Impor

Bahan baku merupakan salah satu unsur pokok industri sehingga dari bahan baku tersebut melalui proses tertentu dihasilkan suatu produk. Bahan baku yang digunakan oleh industri ada yang berasal dari dalam negeri, ada juga yang berasal dari impor luar negeri. Industri manufaktur domestik selama ini masih kental dengan muatan impor (*import content*). Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi impor juga meningkat cukup signifikan. Jadi tingkat ketergantungan industri di Indonesia terhadap bahan baku impor cukup tinggi. Akan tetapi, kebijakan ekspor pemerintah selama ini adalah mengekspor dalam bentuk bahan mentah.⁴⁰ Hal ini dikarenakan harga bahan baku mentah tersebut lebih mahal di luar negeri dan didukung banyaknya permintaan dari luar negeri. Kebijakan ekspor bahan mentah secara gelondongan ini akan menyebabkan banyak industri gulung tikar karena kekurangan bahan baku.

Bahan baku industri sekitar 30% - 60%⁴¹ berasal dari impor luar negeri. Impor Indonesia yang berbentuk bahan baku sejak tahun 2000 mengalami tren peningkatan baik impor barang konsumsi, bahan baku penolong maupun barang modal. Sebagian besar impor tersebut didominasi oleh impor bahan baku penolong untuk industri. Begitu juga pertumbuhan impor bahan baku yang terus mengalami tren peningkatan. Sampai tahun 2010 pertumbuhan impor barang konsumsi mencapai lebih dari 40% lebih tinggi dibandingkan impor-impor bahan baku lainnya, lihat Gambar 6. Besarnya impor bahan baku tersebut karena pasar domestik belum dapat memenuhi permintaan industri dalam negeri terhadap pemenuhan bahan baku industri.

4. Turunnya Kredit Industri

Salah satu sumber modal dalam industri diperoleh dari sektor perbankan yakni dalam bentuk kredit atau pinjaman. Daya tarik relatif industri manufaktur kian meredup sebagaimana terlihat dari porsi kredit ke sektor ini yang turun sangat tajam. Hal ini menandakan bahwa dukungan perbankan terhadap sektor manufaktur semakin turun. Sejak 1997, porsi kredit industri manufaktur terhadap total kredit perbankan menyusut karena bank bersikap hati-hati dalam memilih sektor yang menjadi target kreditnya. Perbankan menilai, pemberian kredit ke sektor ini berisiko tinggi karena sektor manufaktur dinilai *perceived risk*.

⁴⁰"Ekspor Bahan Baku Segera Dibatasi", *Bisnis Indonesia*, 26 April 2011.

⁴¹Perindustrian, www.bappedajateng.info; diakses 7 April 2011.

Kredit ke sektor industri secara nominal tetap tumbuh, tetapi persentasenya makin rendah. Pada tahun 1985 alokasi kredit perbankan ke industri manufaktur mencapai hampir 40%, tetapi pada tahun 2008 sudah terpegang menjadi hanya 16%.⁴² Salah satunya karena banyak industri dianggap bermasalah atau masuk kategori *sunset industry*. Penurunan volume kredit perbankan berarti kelangkaan pembiayaan investasi dan modal kerja bagi sektor industri. Hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya deindustrialisasi.

Sebagian pelaku sektor riil berpandangan suku bunga kredit perbankan masih tinggi dan memberatkan. Saat ini suku bunga utama Bank Indonesia (BI Rate) berada pada kisaran 6,75%, tetapi suku bunga kredit perbankan bisa mencapai 12% atau bahkan lebih tinggi lagi.⁴³ BI Rate yang menjadi acuan bank komersial dalam menetapkan suku bunga kredit sejak tahun 2010 berada pada kisaran 6,50 – 6,75%. Tetapi suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank komersial jauh lebih besar dari acuannya, baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi yakni berkisar antara 12,20 – 16,36%. Pihak perbankan berdalih bahwa suku bunga yang tinggi disebabkan resiko pembiayaan sektor riil yang cukup tinggi.

5. Kebijakan-kebijakan yang Kurang Mendukung Sektor Industri

Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mendorong terjadinya deindustrialisasi antara lain: *pertama*, pembenahan infrastruktur yang tidak kunjung dilakukan. Proyek di sektor infrastruktur banyak mangkrak bertahun-tahun sehingga dapat menyandera perekonomian nasional.⁴⁴ Hal ini akan menyebabkan para pemilik modal (*asing* maupun *domestik*) tidak tertarik melakukan investasi di sektor industri manufaktur. Mereka lebih tertarik berbisnis di sektor jasa sebagai pedagang atau mencari untung dengan memainkan uangnya di pasar modal atau di pasar valuta asing. Maka pembenahan infrastruktur ekonomi merupakan kebijakan yang tidak dapat ditawar lagi.⁴⁵ Kebijakan infrastruktur perlu segera dievaluasi, salah satunya terkait dengan regulasi pembebasan lahan guna mempercepat pembangunan infrastruktur.⁴⁶

⁴²"Mewaspada Gejala Deindustrialisasi", *op.cit.*

⁴³"Madu atau Racun Cadangan Devisa", *op.cit.*

⁴⁴"Perekonomian Tersandera Proyek Mangkrak", *Bisnis Indonesia*, 19 April 2011.

⁴⁵"Deindustrialisasi Indonesia 2011", <http://Inugroho-sbm.blogspot.com/2010/12/>; diakses 18 April 2011.

⁴⁶"Perekonomian Tersandera Proyek Mangkrak", *op.cit.*

Kedua, kebijakan suku bunga bank yang tidak kompetitif. Kebijakan mempertahankan suku bunga tinggi untuk Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Republik Indonesia (ORI) telah membuat para pemilik uang (domestik dan asing) memilih untuk memarkir uangnya di obligasi negara tersebut dan tidak tertarik menanam uangnya di sektor industri manufaktur. Di manapun bunga untuk obligasi yang dikeluarkan negara tidak pernah tinggi. Tanpa bunga tinggipun obligasi negara tetap menarik karena tidak pernah ada negara yang bangkrut. Oleh karena itu suku bunga SUN dan ORI yang saat ini masih sangat tinggi perlu diturunkan.

Ketiga, pengaturan arus modal asing jangka pendek atau uang panas yang belum juga dilakukan oleh BI dan pemerintah. Padahal uang panas tersebut telah menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terlalu kuat sehingga menyebabkan impor mengalir deras dan jika tidak hati-hati akan menyebabkan produk-produk industri manufaktur lokal akan tersaingi. Oleh karena itu BI perlu mengatur arus uang panas ini dengan misalnya mewajibkan kepemilikan instrumen-instrumen keuangan yang lebih panjang.

Keempat, Berhubungan dengan ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan sekarang ini masih membuat pemilik modal tidak mau berinvestasi di industri padat modal. UU ini, menurut Sofjan wanandi, terlalu kaku. Misalnya dalam hal biaya pesangon, di mana biaya pesangon sekarang ini masih terlalu tinggi dan juga kebijakan pekerja *outsourcing* (kontrak) yang tidak sehat.⁴⁷

Kelima, berhubungan dengan penyediaan bahan baku industri khususnya bahan baku impor, pemerintah dinilai lamban dalam merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241 Tahun 2010 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Melalui PMK ini, impor bahan baku dan barang modal dikenai bea masuk 5 – 20% untuk barang tertentu antara lain produk pertanian, perikanan, farmasi, industri manufaktur, dan industri agro. Kebijakan tersebut jelas merugikan pengusaha karena mereka mesti menambah komponen biaya yang tidak dianggarkan sebelumnya.⁴⁸

⁴⁷"Deindustrialisasi Telah Terjadi", <http://www.metrotvnews.com/read/news/2010/11/26/35068>; diakses 18 April 2011.

⁴⁸"Pemerintah Tunda Pemberlakuan PMK 241 Tahun 2010", <http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/56978>; diakses 19 April 2011.

6. Buruknya Kinerja Ekspor Manufaktur

Salah satu faktor yang juga diduga kuat menjadi pendorong proses deindustrialisasi di Indonesia adalah memburuknya kinerja perdagangan luar negeri produk manufaktur Indonesia. Pangsa pasar industri yang berbasis manufaktur semakin mengecil, sedangkan industri berbasis sumber daya alam terus menguat.⁴⁹ Hal ini dikarenakan kebijakan ekspor pemerintah selama ini berbentuk kebijakan ekspor bahan baku mentah. Jika kondisi ini terus terjadi akibatnya akan menurunkan kinerja ekspor produk manufaktur di pasar internasional. Selain itu terus membanjirnya produk manufaktur impor di pasar domestik, baik legal maupun illegal terutama dari Cina. Hal ini menyebabkan produk lokal mengalami penurunan permintaan karena harga produk lokal tidak dapat bersaing. Penurunan permintaan domestik produk manufaktur lokal menyebabkan kapasitas produksi berkurang dan pada akhirnya menyebabkan deindustrialisasi. Ekspor produk industri sejak tahun 1996 terus mengalami peningkatan tetapi pertumbuhannya masih kalah dibandingkan ekspor produk pertanian, tambang, dan sektor lainnya.

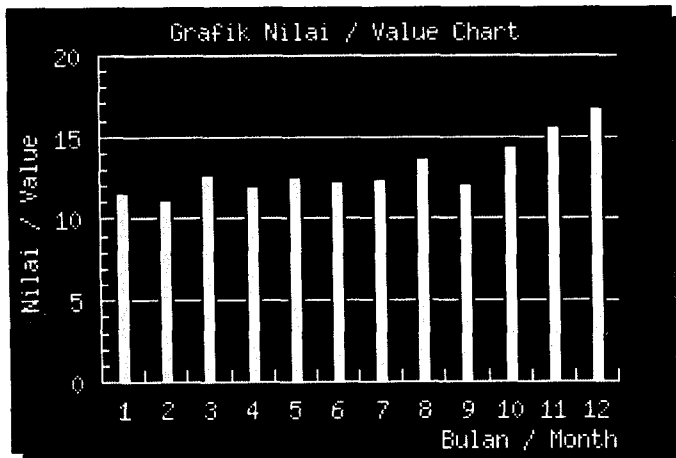
C. Dampak-dampak Deindustrialisasi

Secara umum, deindustrialisasi akan berdampak pada menurunnya nilai tambah industri nasional dan tergerusnya aktivitas perekonomian. Dari beberapa sumber, setidaknya dapat ditemukan empat akibat terjadinya deindustrialisasi. *Pertama*, semakin berpotensi negara Indonesia menjadi negara yang konsumtif. Hal ini dapat dibuktikan dengan neraca impor dalam beberapa tahun belakangan ini. (lihat Gambar 3). Gambar tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan nilai impor, bahwa kecenderungan yang ada dari gambar tersebut adalah Indonesia semakin menjadi negara pengimpor. Melemahnya perindustrian Indonesia, ditambah dengan era perdagangan bebas yang sudah banyak diberlakukan sekarang tentunya membawa dampak pada semakin berpotensi Indonesia menjadi negara konsumtif. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang tentunya akan selalu ada, dan tarafnya akan selalu meningkat, dan harus ditingkatkan, dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bangsa sendiri,

⁴⁹"Mewaspadai Gejala Deindustrialisasi", *op.cit.*

akan menyebabkan negara ini menjadi negara yang akan membeli dari bangsa lain.⁵⁰

Kedua, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur. Menjadi negara konsumtif, yang juga menjadi negara pengimpor akan membawa dampak lain yang lebih berbahaya, yaitu ketergantungan kepada bangsa lain. Secara logika, melemahnya industri manufaktur Indonesia akan sejalan paralel dengan meningkatnya impor barang-barang produksi, jika memang kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak akan dikorbankan. Selama ini, kontribusi nilai dan berat ekspor Indonesia masih didominasi dari hasil industri primer, beberapa contohnya yaitu *natural rubber, wood, plywood, chemical wood pulp, paper, paperboard, cotton yarn, fish, palm oil, coffee, cocoa beans*, dan sebagainya.⁵¹



Gambar 3. Grafik nilai impor 2010 (Sumber : BPS, 2010)

Ketiga, sulitnya melakukan reindustrialisasi. Deindustrialisasi juga dapat menyebabkan sulitnya reindustrialisasi. Reindustrialisasi atau menggairahkan kembali sektor industri bukanlah perkara mudah. Solusi koprehensif harus benar-benar diterapkan. Mulai dari solusi mikro berupa mempermudah investasi dan pemasaran, hingga langkah mikro berupa stabilisasi perekonomian.⁵²

Dalam beberapa tahun terakhir, persentase pekerja di industri manufaktur mengalami penurunan, dari 18,8% tahun 2005 menjadi 12,07% tahun 2009.⁵³ Masalah ini tidak hanya pada membanjirnya jumlah tenaga kerja

⁵⁰"Fenomena Deindustrialisasi di Indonesia", <http://km.itb.ac.id/sitel?p=496>; diakses 18 April 2011.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

⁵³"Fenomena Deindustrialisasi di Indonesia", *op.cit.*

(*oversupply*), tetapi lebih disebabkan menciutnya permintaan tenaga kerja akibat melemahnya daya saing industri nasional.⁵⁴ Hal inilah yang menyebabkan daya serap tenaga kerja sektor formal merosot. Jadi, dampak deindustrialisasi *keempat* adalah tingkat penyerapan tenaga kerja yang terus mengalami penurunan sehingga akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika hal ini terus terjadi berdampak terhadap kenaikan pengangguran. Statistik jumlah pengangguran sejak tahun 2004 terus mengalami peningkatan yakni 9,9% (2004) menjadi 10,3% (2005) dan 10,4% (2006). Sampai tahun 2010 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,32 juta dengan perincian: lulusan SD sebanyak 2,07 juta; lulusan SLTP sebanyak 1,53 juta; lulusan SLTA sebanyak 1,89 juta; lulusan SMK sebanyak 1,05 juta; lulusan Diploma sebanyak 0,38 juta; lulusan Sarjana sebanyak 0,63 juta; dan lulusan lainnya sebanyak 0,77 juta.⁵⁵

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Terjadinya deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator di antaranya: tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri khususnya sektor manufaktur mengalami penurunan dibandingkan serapan tenaga kerja sektor lain seperti pertanian, pertambangan dan jasa, menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri terutama industri manufaktur, kecenderungan penurunan daya saing produksi barang dalam negeri di pasar internasional berdasarkan WCY dan GCI, dan Indonesia kian tersingkir dari jaringan produksi manufaktur regional dan global, terlihat dari porsi *parts and components* yang sangat kecil di dalam ekspor Indonesia.

Terjadinya gejala deindustrialisasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu buruknya kualitas infrastruktur, kurangnya jaminan pasokan energi (meliputi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, kurangnya pasokan listrik dan kebijakan pemerintah menaikkan TDL, dan ketersediaan gas yang minim untuk industri), tingginya pasokan bahan baku impor, turunnya kredit industri, kebijakan-kebijakan kurang mendukung sektor industri (seperti kebijakan suku

⁵⁴"Denasionalisasi Ekonomi", *op.cit.*

⁵⁵RI dan Cina Bersepakat Kembangkan SDM", *Bisnis Indonesia*, 26 April 2011.

bunga yang tidak kompetitif, peraturan yang menghambat impor bahan baku, dan sebagainya), dan buruknya kinerja ekspor manufaktur.

Deindustrialisasi akan berdampak pada menurunnya nilai tambah industri nasional dan tergerusnya aktivitas perekonomian, diantaranya: semakin berpotensi negara Indonesia menjadi negara yang konsumtif, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur, sulitnya melakukan reindustrialisasi, dan tingkat penyerapan tenaga kerja terus mengalami penurunan sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia.

B. Rekomendasi

Diperlukan upaya untuk meminimalisasi bahkan menghentikan proses deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia. Untuk menghentikan atau meminimalisasi deindustrialisasi diperlukan beberapa kebijakan dalam sektor industri. *Pertama*, kebijakan yang berkaitan dengan pemberian stimulus fiskal bagi sektor industri. Di antaranya adalah menurunkan bea masuk bagi impor bahan baku dan bahan penolong yang masih dibutuhkan industri dalam negeri. Mengingat kandungan komponen impor industri dalam negeri masih sangat tinggi. Mengkaji ulang UU perpajakan yang dirasakan memberatkan bagi sektor industri. Mengembangkan insentif berupa tarif bea masuk dan perpajakan yang dapat mendorong bangkitnya kembali sektor industri di Indonesia, utamanya bagi industri yang berorientasi ekspor dan industri yang meningkatkan lapangan pekerjaan, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Kedua*, perlunya kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif termasuk UU pengadaan lahan. *Ketiga*, kebijakan fiskal harus terus ekspansif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Prasetyantoko, *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Hollis Chenery dan Moises Syrquin, *Patterns of Development, 1950 – 1970*, Oxford University Press, 1975.
- Stephen Bazen dan Thirwall, *Deindustrialization (2nd ed)*, Oxford, Heinemann Educational Books LTD, 1992, hal. 4
- Imam Sugema, dkk., *Dampak Kenaikan Harga BBM dan Efektivitas Program Kompensasi*, Penerbit INDEF, Jakarta, 2005.
- Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

- R.E.Rowthorn dan J.R.Wells, *De-Industrialization and Foreign Trade*, New York : Cambridge University Press, 1987.
- E.K.Choi, *Infrastructure Aid, Deindustrialization, and Welfare*, IMF Working Papers, WP/05/150, Juli 2005.
- R.Rowthorn dan R.Ramaswamy, *Deindustrialization : Its Causes and Implications*, Economic Issues, IMF, September 1997.
- Robert Rowthorn dan Ramana Ramaswamy, *Growth, Trade, and Deindustrialization*, IMF Staff Papers, Vol. 46, No. 1, Maret 1999, hal. 18.
- _____, *Growth, Trade, and Deindustrialization*, IMF Staff Papers, Vol. 46, No. 1, Maret 1999.
- S.Dasgupta dan A.Singh, *Manufacturing, Services and Premature De-Industrialisation in Developing Countries : A Kaldorian Empirical Analysis*, Centre for Business Research (CBR), University of Cambridge, WP. No. 327, Juni 2006.

Artikel dalam koran :

Faisal Basri, "Industri Indonesia Masih Tergantung Luar Negeri", *Suara Karya*, 9 Desember 2004.

Rudi Ariffianto, "Pertumbuhan Manufaktur di Bawah Target", *Bisnis Indonesia*, 14 April 2011.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang):

Daya Saing Produk Terbebani Biaya Logistik, *Neraca*, 11 Februari 2011.

Deindustrialisasi Bukan Hal Mustahil, *Kompas*, 6 Desember 2010.

Deindustrialisasi di Depan Mata, *Media Indonesia*, 20 Januari 2011.

Editorial : Tragedi Infrastruktur, *Media Indonesia*, 7 April 2011.

Ekspor Bahan Baku Segera Dibatasi, *Bisnis Indonesia*, 26 April 2011.

Industri Butuh Kepastian Pasokan Gas, *Bisnis Indonesia*, 16 April 2011.

Infrastruktur Menjadi Syarat Mutlak, *Kompas*, 20 April 2011.

Infrastruktur Pepesan Kosong!, *Bisnis Indonesia*, 22 Februari 2011.

Kerja Keras Menuju Kemandirian Energi, *Media Indonesia*, 29 Januari 2010.

Ketimpangan Alur Distribusi Turunkan Nilai Kompetitif, *Kompas*, 15 Januari 2010.

Komitmen Investasi Capai Rp 1.993 Triliun, *Republika*, 20 April 2011.

Madu atau Racun Cadangan Devisa, *Kompas*, 24 Desember 2010.

Menjaga Indonesia Tetap Berenergi, *Media Indonesia*, 20 Oktober 2010.

Mewaspada Gejala Deindustrialisasi, *Business News*, 6 Desember 2010.

Pembangunan Infrastruktur : Dana Besar Bukan Jaminan, *Koran Jakarta*, 22 Februari 2011.

Pemerintah Lamban Sediakan Infrastruktur Gas : Pasokan Gas Seret, Industri Terkapar, *Neraca*, 14 April 2011.

Perekonomian Tersandera Proyek Mangkrak, *Bisnis Indonesia*, 19 April 2011.

PGN Akui Pasokan Gas Timpang, *Republika*, 14 April 2011.

PLN Tetap Mencabut Capping TDL, *Kompas*, 2 Februari 2011.

Rakyat Pikul Beban Ganda Penaikan Tarif Listrik, *Media Indonesia*, 15 Juli 2010.

Realisasikan Infrastruktur, *Kompas*, 20 April 2011.

RI dan Cina Bersepakat Kembangkan SDM, *Bisnis Indonesia*, 26 April 2011.

Tarif Dasar Listrik Industri Kian Mempercepat Deindustrialisasi, *Kompas*, 11 Januari 2011.

TDL dan PMK Impor Ganjal Pertumbuhan Industri Manufaktur, *Neraca*, 27 Januari 2011.

SBY Respon Soal Perbankan Infrastruktur, *Neraca*, 20 April 2011.
Sebaiknya Fokus Eksekusi Proyek, *Kompas*, 21 April 2011.
190 Pos Tarif Bahan Baku dan Mesin Direvisi, *Bisnis Indonesia*, 21 April 2011.

Dokumen resmi :

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2010, Badan Pusat Statistik (BPS).
World Competitiveness Yearbook Tahun 2010, www.imd.org; diakses 4 Maret 2011.
The Global Competitiveness Report 2010 – 2011, www.weforum.org; diakses 4 Maret 2011.
Publikasi BPS (data diolah), www.bps.go.id; diakses 20 April 2011.

Buku terjemahan:

N.Gregory Mankiw, *Makroekonomi : Terjemahan*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, hal. 309.

Tesis:

Wawan Suwarman, *Faktor-faktor Apakah yang Mendorong Terjadinya Proses Deindustrialisasi di Indonesia?*, Tesis, Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Hery S.J.N. Sriwiyanto, *Fenomena Deindustrialisasi dan Formulasi Industri Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, 8 – 9 Desember 2004, di Hotel Nikko Jakarta.

Internet :

- Awas Deindustrialisasi Pertumbuhan Industri Manufaktur Terus menurun*, www.ikbiz.com; diakses 15 April 2011.
- A.Meryani, 2010, *Buruknya Infrastruktur Picu Deindustrialisasi*, <http://economy.okezone.com>; diakses 2 Maret 2011.
- Erlangga Djumena, 2010, *LIPI : Indonesia Menuju Deindustrialisasi*, www.kompas.com; diakses 2 Maret 2011.
- Deindustrialisasi di Depan Mata*, <http://www.inilah.com/read/detail/46876/deindustrialisasi-di-depan-mata/>; diakses 20 Januari 2011.
- Deindustrialisasi Indonesia 2011*, <http://nugroho-sbm.blogspot.com/2010/12/>; diakses 18 April 2011.
- Deindustrialisasi Telah Terjadi*, <http://www.metrotvnews.com/read/news/2010/11/26/35068>; diakses 18 April 2011.
- Fahmy Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*, www.books.google.co.id; diakses 10 Maret 2011.
- Faisal Basri, 2009, *Deindustrialisasi Betul-Betul Serius!*, www.kompasiana.com; diakses 2 Maret 2011.
- Fenomena Deindustrialisasi di Indonesia*, <http://km.itb.ac.id/site/?p=496>; diakses 18 April 2011.
- Industri Lenyap 2 – 3 Tahun Lagi?*, <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1160702/>; diakses 20 Januari 2011.
- Industri Minta Kepastian Pasokan Gas*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/04/08/brk,20110408-326209.id.html>; diakses 14 April 2011.
- Jumlah Perusahaan Menurut Sub Sektor 2001 – 2009*, www.bps.go.id; diakses 20 April 2011.
- Kawasan Industri Defisit Pasokan Listrik*, www.bataviase.co.id; diakses 7 Maret 2011.
- Kenaikan Harga BBM Perlemah Daya Tahan Industri Manufaktur*, www.okezone.com; diakses 10 Maret 2011.
- Kenaikan Harga BBM : Kebijakan Panik dan Tidak Adil*, <http://teguhtimur.com/2008/05/09/>; diakses 10 Maret 2011.
- Masalah UMKM Tak Hanya Modal Pasar*, <http://bataviase.co.id/node/122278>; diakses 4 Maret 2011.

Mewaspadaikan Ancaman Deindustrialisasi, <http://www.investor.co.id>; diakses 18 April 2011.

Mudrajad Kuncoro, 2009, *Stop Deindustrialisasi*, www.mudrajad.com; diakses 3 Maret 2011.

Peraturan Bea Masuk Impor Diminta Dicabut, <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2011/02/10/320/423599>; diakses 19 April 2011.

Pemerintah Tunda Pemberlakuan PMK 241 Tahun 2010, <http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/56978>; diakses 19 April 2011.

Perindustrian, www.bappedajateng.info; diakses 7 April 2011.

Persoalan Listrik Picu Deindustrialisasi, <http://www.borneotribune.com>; diakses 18 April 2011.

Rohman, 2011, *Indonesia di Ambang Era Deindustrialisasi*, <http://www.thecoreaction.com>; diakses 1 Maret 2011.

Waspadaikan Lonjakan Pengangguran Akibat Kenaikan TDL, www.republika.co.id; diakses 7 April 2011.

